

ABSTRAK

Nama : Zulfyar Ilham Ramadhan
Program Studi : Pascasarjana Magister Kenotariatan
Judul : Kebijakan Hukum Pendaftaran Sertifikat Tanah Secara Elektronik dalam Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli di Kabupaten Purwakarta

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dan kepemilikan sertifikat tanah secara konvensional di Indonesia telah dilaksanakan selama 64 (enam puluh empat) tahun sejak tahun 1960, tepatnya pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mulai berlaku. Seiring dengan kemajuan teknologi digital yang semakin tepat dan efektif dalam berbagai sektor, penerapan teknologi dalam administrasi pernatanaan di Indonesia juga mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang mengatur mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Data yang dipergunakan adalah data sekunder, Analisa data yang digunakan analisis normatif, Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian terhadap status hukum dan keabsahan penerbitan sertifikat tanah elektronik serta mengevaluasi implementasi kebijakan hukum pada proses pendaftaran sertifikat tanah secara elektronik dalam peralihan hak milik melalui jual beli di Kabupaten Purwakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sertifikat elektronik merupakan alat bukti kepemilikan yang sah sama seperti sertifikat fisik. Kantor ATR/BPN Kabupaten Purwakarta, sebagai pemangku kebijakan dalam bidang pendaftaran tanah, seharusnya memiliki arah yang jelas dalam menentukan sistem pendaftaran yang akan digunakan, apakah konvensional (fisik) atau elektronik (digital) agar tidak terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Elektronik.

ABSTRACT

Nama : Zulfyar Ilham Ramadhan
Program Studi : Pascasarjana Magister Kenotariatan
Judul : Legal Policy for Registration of Land Certificates
Electronics in the Transfer of Ownership Rights Through
Buying and Selling in Purwakarta Regency

The implementation of land registration and land certificate ownership conventionally in Indonesia has been carried out for 64 (sixty-four) years since 1960, precisely at the time of the Act No. 5 of 1960 on the Basic Regulations of Agrarian Trees (UUPA) came into force. Along with digital technology advances that are becoming more appropriate and effective in various sectors, the application of technology in agricultural administration in Indonesia has also undergone changes since the issue of the Regulation of the Minister of Agriculture and Space Administration/Head of the National Farming Agency of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2021 on Electronic Certificates that regulate the implementation of land registration electronically. The purpose of this research is to conduct a study of the legal status and validity of the issuance of electronic land certificates as well as to evaluate the implementation of legal policy on the process of registration of land certificate electronically in the transfer of ownership rights through sale and purchase in Purwakarta District. The results of this study show that an electronic certificate is a valid proof of ownership as well as a physical certificate. The ATR/BPN office of Purwakarta district, as the policy holder in the field of land registration, should have a clear direction in determining the registration system to be used, whether conventional (physical) or electronic (digital) in order to avoid inconsistencies in its implementation.

Keywords: Legal policy, Land Registration, Electronic Certificate.